

**PERAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
KEAGAMAAN DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN:  
Kasus di GPIB Jemaat "EKKLESIA" DKI Jakarta dan GPIB  
Jemaat "NEHEMIA" Desa Cipayung, Kabupaten Bogor**

**Rohadi Joshua Sutisna**

**Abstract**

Reformation was introduced to Indonesia in 1998 but it has not been able to alleviate poverty. Many think that it is the government who holds the greatest responsibility for poverty. In fact, the government is not the only stakeholder in development. The private sector and civil society organizations also play an important role in it. The Protestant Church in West Indonesia (GPIB) as part of civil society organizations seems to play a very strategic role in development, including poverty alleviation. Some studies show that the quality of leadership is one of the factors that determines GPIB's role in reducing poverty. This is closely related to the creation of people's character that enables the religious civil society organization to make maximum contributions to reducing poverty. Therefore, the 12S-7C5P-3S-GT Navigation Model may provide the leaders and people of GPIB with guidelines to build their character so that they will be ready and able to play a concrete role in alleviating poverty.

Keywords: Religious Civil Society Organization, Role, Poverty Alleviation, Navigation Model, The Protestant Church in West Indonesia (GPIB), Good Governance.

**Pendahuluan**

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 di Indonesia ternyata belum mampu untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2005 adalah 35,1 juta jiwa (15,97%), sedangkan pada tahun 2006 berjumlah 39,05 juta jiwa (17,75%).<sup>1</sup> Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah diimplementasikan ternyata

---

<sup>1</sup> Biro Pusat Statistik, "Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006" (BPS, 2006), 1.

belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.<sup>2</sup>

Banyak pihak berpendapat bahwa kemiskinan yang terus berkepanjangan adalah tanggungjawab pemerintah saja. Anggapan ini tidak sepenuhnya tepat karena usaha penanggulangan kemiskinan sejatinya hasil sinergi dan kolaborasi para *stakeholder* pembangunan. Tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) idealnya harus melibatkan 3 (tiga) *stakeholder* pembangunan, yaitu: pemerintah selaku penyelenggara *public services*, kelompok pengusaha yang mewakili *private sector*, dan masyarakat sipil (*civil society*).<sup>3</sup> Ketiga *stakeholder* ini yang harus bertanggungjawab secara bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan bangsa dan negara, serta pelayanan publik secara adil dan merata.

Organisasi kemasyarakatan (orkemas) keagamaan sebagai bagian dari organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) sesungguhnya punya peran sangat strategis di berbagai bidang pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan. Seperti diketahui, *core* orkemas keagamaan, termasuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), antara lain sebagai wadah pembentukan nilai-nilai intrinsik yang mempengaruhi perilaku produktif umat agar mau dan mampu membebaskan diri dari belenggu kemiskinan.<sup>4</sup>

Contoh faktual yang masih terus aktual akan hal ini adalah pada diri seorang Romo Mangun, rohaniwan Katolik.<sup>5</sup> Baginya, ber-TUHAN berarti juga memuliakan martabat manusia. Memuliakan martabat manusia tidak cukup hanya dengan berbicara saja tapi harus diikuti dengan tindakan nyata. Cerminan dari pemikiran tersebut adalah kasus penolakan rencana penggusuran ± 30-40 keluarga yang menghuni kawasan kumuh Kali Code. Tercatat 3 (tiga) peran signifikan Romo Mangun dalam memperbaiki pemukiman warga Kali Code, yaitu: (1) Berhasil mengubah mentalitas membuang sampah sembarangan masyarakat bantaran Kali Code, (2) Berhasil menginisiasi perbaikan tata pemukiman dan lingkungan bantaran Kali Code sehingga kawasan Kali Code menjadi bersih dan tertata, dan (3) Mendirikan Yayasan Pondok Rakyat (YPR) yang adalah wadah pemberdayaan masyarakat dalam

<sup>2</sup> Hamonangan Ritonga, "Mengapa Kemiskinan Di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?" *Kompas*, 2003, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm>.

<sup>3</sup> Joko Widodo, *Good Governance: Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2001), 26.

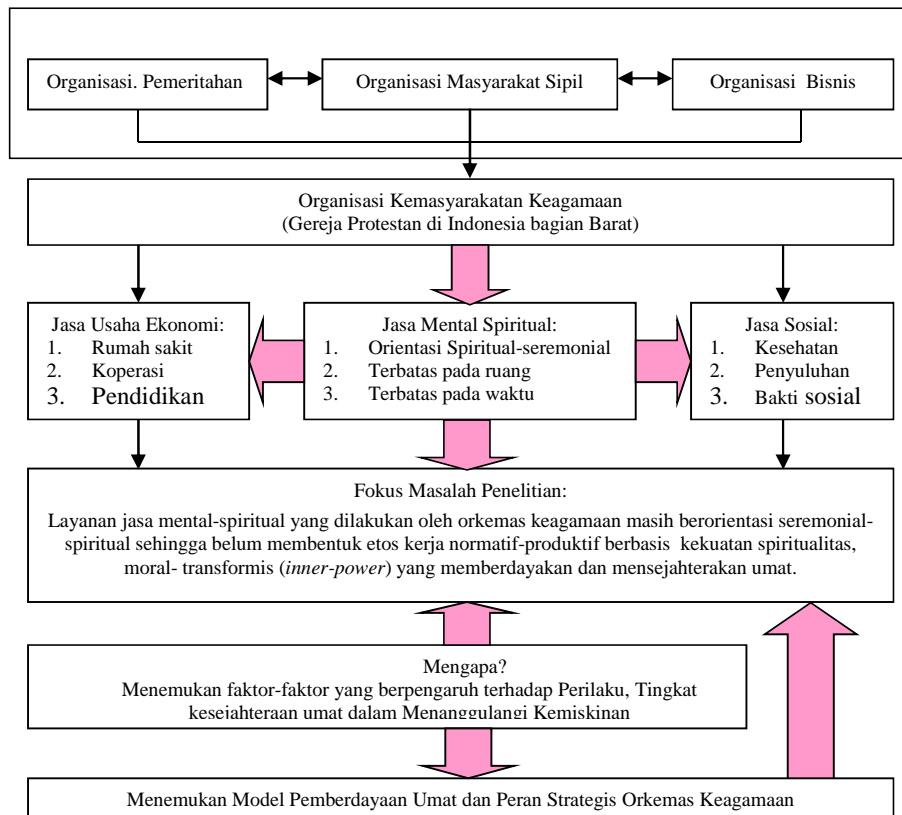
<sup>4</sup> Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* (New York: Charles Scribner's Sons, 1958), 172.

<sup>5</sup> Anjas Prasetyo, "Romo Mangun, Pembela Wong Cilik Kali Code.," *Kompasiana*, November 10, 2012, <http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/10/romo-mangun-pembela-wong-cilik-kali-code-507976.html>.

bidang lingkungan dan pendidikan kritis melalui pendekatan sosio-kultural.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui mutu layanan/jasa GPIB dalam penanggulangan kemiskinan umat dan (2) Menemukan model pemberdayaan yang seyogianya dilakukan GPIB untuk menanggulangi masalah kemiskinan, baik umat maupun masyarakat.

**Kerangka Berpikir**



Gambar: “Kerangka Berpikir yang digunakan dalam Penelitian”

**Metode Penelitian**

Disain penelitian adalah gabungan antara *descriptive research* dan *explanatory research*.<sup>6</sup> Pelaksanaannya di 2 (dua) orkemas keagamaan GPIB, yaitu: GPIB Jemaat "Ekklesia" Jakarta (tipologi masyarakat perkotaan) dan GPIB Jemaat "Nehemia" Cipayung,

<sup>6</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, 3rd ed. (New York: Allyn and Bacon, 1997), 462–478.

Bogor (tipologi masyarakat pedesaan), dari bulan Januari sampai dengan Desember 2007.

Populasi penelitian, yaitu seluruh umat di GPIB Jemaat "Ekklesia" Jakarta dan GPIB Jemaat "Nehemia" Desa Cipayung, Kabupaten Bogor. Jumlah sampel sebanyak 244 responden (164 responden di GPIB Jemaat "Ekklesia," Jakarta dan 80 responden di GPIB Jemaat "Nehemia," Desa Cipayung, Kabupaten Bogor) yang dipilih secara acak sederhana (*random sampling*). Data primer dan sekunder diperoleh melalui: wawancara terstruktur, wawancara mendalam dengan responden, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dari responden dan hasil observasi lapangan dianalisis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak, yaitu program SPSS 14 (*Statistical Program for Social Science*)<sup>7</sup> untuk melakukan uji beda (uji U Mann Whitney).<sup>8</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### GPIB Jemaat "EKKLESIA" & GPIB Jemaat "NEHEMIA"

Penyelenggaraan bergereja di GPIB Jemaat "EKKLESIA" DKI Jakarta dan GPIB Jemaat "NEHEMIA" Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengacu pada "Program Kerja & Anggaran Pendapatan Belanja Tahunan" (PK & APBT) Gereja. Dari PK & APBT, terlihat bahwa layanan jasa yang kedua GPIB tersebut beriklan mencakup apa yang menjadi *felt* dan *real needs* umat. Layanan jasa ini tidak hanya untuk umat saja tetapi juga untuk seluruh *stakeholder*, termasuk yang tidak seiman sekalipun.

Layanan jasa untuk umat mencakup: (1) Layanan jasa mental spiritual (Teologi), (2) Layanan jasa usaha produktif/ekonomi (PEG = Pembangunan Ekonomi Gereja), dan (3) Layanan jasa aksi sosial (PelKes = Pelayanan & Kesaksian). Layanan jasa untuk para *stakeholder*, termasuk yang tidak seiman, umumnya adalah layanan jasa aksi sosial yang cenderung bersifat situasional dan insidental. Misalnya, pemberian bantuan korban bencana alam seperti: banjir lumpur di Porong, Jawa Timur atau bantuan untuk masyarakat yang terkena banjir tahunan di daerah Cililitan dan Kalibata.

Dari PK & APBT 2008 di kedua GPIB tersebut, terlihat bahwa layanan jasa mental spiritual untuk umat mencakup berbagai

<sup>7</sup> Sri Rahayu, *SPSS Versi 12.00 Dalam Riset Pemasaran* (Bandung: Alfabeta, 2005), 5.

<sup>8</sup> Singgih Santoso, *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 12.

kegiatan, seperti: kegiatan peribadahan, yaitu antara lain: Ibadah Hari Minggu (termasuk Sakramen Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus); Kebaktian Rumah Tangga (KRT); Ibadah Pelayanan Kategorial (Persekutuan Kaum Lanjut Usia/PKLU, Persekutuan Kaum Bapak/PKB, Persatuan Wanita/PW, Gerakan Pemuda/GP, Persekutuan Teruna/PT, Pelayanan Anak/PA), dan lain sejenisnya. Selain kegiatan peribadahan, kegiatan lain yang termasuk dalam layanan jasa mental spiritual adalah Pembinaan Warga Gereja (PWG) dalam bentuk seminar atau lokakarya yang bersifat kerohanian atau teologis.

Untuk layanan jasa usaha produktif/ekonomi mencakup kegiatan-kegiatan, seperti: aksi penggalangan dana dalam bentuk penjualan makanan, kupon undian berhadiah, atau penyebaran amplop donatur. Penggalangan dana ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan untuk layanan jasa aksi sosial, terlihat bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orkemas keagamaan tersebut meliputi, antara lain: pemberian bantuan untuk umat, baik bantuan anak sekolah (BAS), bantuan orang sakit (BOS), bantuan yang terkena musibah, baik musibah banjir atau kebakaran dan musibah lainnya.

Dari analisis data realisasi PK & APBT di kedua GPIB tersebut dan wawancara mendalam dengan para pemimpin gereja, umat, dan *stakeholder*, termasuk masyarakat yang tidak seiman, memperlihatkan hasil yang hampir serupa, yaitu:

- (a) Layanan jasa di kedua GPIB tersebut cenderung berorientasi pada layanan jasa mental spritual. Ini terlihat dari rata-rata realisasi anggaran belanja tahunan untuk layanan jasa mental spiritual yang mencapai  $\pm 65\%$  dari total belanja tahunan jemaat. Fokus pada layanan jasa mental spiritual sangat baik karena seperti diketahui layanan jasa ini dapat membentuk nilai-nilai intrinsik umat, seperti: cara pikir, sistem nilai yang dianut, maupun keyakinan (*beliefs*) umat. Sayangnya dari hasil analisis data terlihat bahwa realisasi sebesar 65% ini digunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat teknis, antara lain seperti: biaya berbagai peribadahan, seminar, dan loka-karya (termasuk honor dan transportasi pembicara maupun untuk konsumsi), biaya rapat para presbiter maun non presbiter, dan lain sejenisnya. Wajar hal ini terjadi karena memang desain kegiatan sangat fokus pada mental spiritual
- (b) Rata-rata realisasi anggaran belanja tahunan di kedua GPIB tersebut untuk layanan jasa aksi sosial adalah sebesar  $\pm 22.5\%$ . Untuk umat rata-rata per- tahun sebesar mencapai  $\pm 20\%$ . Untuk para stakeholder termasuk masyarakat sekitar yang tidak seiman, adalah sisanya yaitu sebesar  $\pm 2.5\%$ . Realisasi anggaran belanja tahunan ini meliputi, antara lain: bantuan untuk anak sekolah (BAS), bantuan untuk yang sakit di rumah

sakit (BOS), dan bantuan untuk yang tertimpa musibah; sedangkan bantuan untuk para *stakeholder* dan masyarakat sekitar yang tidak seiman biasanya bersifat insidental atau situasional seperti yang sudah disebut di atas.

- (c) Rata-rata realiasi anggaran belanja tahunan di kedua GPIB tersebut untuk layanan jasa usaha produktif/ekonomi adalah yang paling kecil, yaitu hanya sebesar  $\pm 12\%$ . Biasanya, untuk modal awal penggalangan dana, biaya pemeliharaan dan perbaikan gedung gereja dan rumah pendeta, serta bantuan untuk pembangunan gedung gereja lain. Hasil wawancara mendalam dengan para pejabat orkemas keagamaan memperlihatkan bahwa bantuan pemberian modal usaha untuk umat maupun stakeholder, termasuk masyarakat sekitar yang tidak seiman, belum ada.

Temuan ini bermakna bahwa layanan jasa yang GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta berikan cenderung berorientasi pada layanan jasa mental spiritual. Baru kemudian diikuti dengan layanan jasa aksi sosial dan layanan jasa usaha produktif/ekonomi.

Untuk GPIB Jemaat “NEHEMIA” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor, makna dari temuan ini adalah bahwa layanan jasa yang diberikan cenderung sama dengan GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta, yaitu berorientasi pada layanan jasa mental spiritual. Baru kemudian diikuti dengan layanan jasa aksi sosial dan layanan jasa usaha produktif/ekonomi.

## **Kemiskinan**

### *Pengertian Kemiskinan*

Pengertian kemiskinan sangat beragam; mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (butsarman) dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Definisi kemiskinan mengalami perkembangan sesuai dengan penyebabnya yaitu, pada awal 1990-an definisi kemiskinan telah diperluas tidak hanya berdasarkan tingkat pendapatan, tapi juga mencakup ketidakmampuan di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan. Belakangan pengertian kemiskinan telah mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Komite Penanggulangan Kemiskinan, *Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Sebuah Kerangka Proses Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang* (Jakarta: KPK, 2003), 6.

### *Penyebab Kemiskinan*

Penyebab kemiskinan menurut E. Papilaya adalah: akar ke-1: kurang produktifnya perilaku rumah tangga miskin; akar ke-2: kurang normatifnya perilaku elitis; akar ke-3: lemahnya kepribadian rumahtangga miskin; akar ke-4: memudarnya sistem nilai budaya; akar ke-5: kuatnya kepentingan elitis; akar ke-6: ketimpangan infrastruktur; akar ke-7: persaingan yang tidak adil, dan akar ke-8: deprivasi kapabilitas aset produksi.<sup>10</sup> Selanjutnya menurut E.Papilaya, akar penyebab kemiskinan yang paling menentukan adalah: (1) kurang produktifnya perilaku rumahtangga miskin yang tercermin dari rendahnya tingkat kognitif, sikap mental, dan ketrampilan dalam menanggulangi kemiskinan dan (2) kurang normatifnya perilaku elitis yang dapat dicermati dari membiasnya pola pikir, pola sikap, dan pola tindak para elitis dalam menanggulangi kemiskinan.

### **Mutu Jasa GPIB**

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) menurut M.Slamet adalah suatu pola manajemen yang berisi prosedur agar setiap orang yang ada di dalam organisasi berusaha keras secara terus-menerus memperbaiki jalan menuju sukses.<sup>11</sup> MMT bukanlah seperangkat peraturan dan ketentuan yang kaku dan harus diikuti, melainkan seperangkat prosedur dan proses untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan mutu kerja. MMT adalah cara lain untuk mengatur usaha-usaha orang banyak, yaitu penyelarasan usaha-usaha yang sedemikian rupa sehingga setiap orang akan semangat dalam menghadapi tugasnya dan berpartisipasi dalam perbaikan pelaksanaan pekerjaan.

Tujuan utama MMT adalah meningkatkan mutu pekerjaan dan memperbaiki produktivitas serta efisiensi. MMT menuntut adanya perubahan sifat hubungan antara yang mengelola (pimpinan) dan yang melaksanakan pekerjaan (karyawan, bawahan, dan lain-lain yang terkait). Perintah dari atas diubah menjadi inisiatif dari bawah dan tugas pimpinan tidak hanya memberi perintah tetapi mendorong dan memfasilitasi perbaikan mutu pekerjaan yang dilakukan bawahan.

---

<sup>10</sup> Eddy Chiljon Papilaya, "Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumahtangga Dan Strategi Penanggulangannya: Kasus Di Kota Ambon Provinsi Maluku Dan Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo" (Disertasi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006), 23–27.

<sup>11</sup> M. Slamet, "Materi Kuliah Manajemen Mutu Terpadu (MMT)" (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2002), 7.

Filosofi MMT, antara lain: (1) setiap pekerjaan menghasilkan benda atau jasa, (2) benda atau jasa itu diproduksi karena ada yang memerlukan, (3) orang-orang yang memerlukan benda atau jasa tersebut disebut pelanggan, (4) produk benda atau jasa itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh pelanggan, (5) benda atau jasa harus dibuat sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, dan (6) benda atau jasa yang dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan pelanggannya disebut benda yang bermutu. Sementara dari sisi penerapannya maka MMT terdiri dari lima unsur utama, yaitu: (1) fokus pada pelanggan, (2) perbaikan pada proses secara sistematis, (3) pemikiran jangka panjang, (4) pengembangan sumberdaya manusia, dan (5) komitmen pada mutu.

Menurut M.D.Ibrahim karakteristik mutu jasa harus mengacu pada beberapa kriteria, antara lain adalah: *reliability, responsiveness, compliance, access, courtesy, communication, credibility, security, understanding the customer, assurance*, dan *tangibles*.<sup>12</sup> Semua unsur dari karakteristik mutu jasa inilah yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau *Total Quality Management (TQM)*.

Dari aspek proses, untuk menghasilkan suatu produk barang atau jasa yang bermutu ada 3 elemen karakteristik mutu yang menjadi parameter vital, yaitu seperti yang terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel “Tiga Elemen Karakteristik Mutu”

Elemen	Penyerahan	Interaksi
Lebih cepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia</li> <li>▪ Kenyamanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cara memberikan pelayanan</li> <li>▪ Kemudahan memperoleh barang jasa</li> </ul>
Lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik operasi</li> <li>▪ Ciri-ciri khusus</li> <li>▪ Bekerja lancar</li> <li>▪ Sesuai standart</li> <li>▪ Pelayanan handal</li> <li>▪ Aestetika produk/jasa</li> <li>▪ Persepsi kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kecepatan bekerja dengan benar</li> <li>▪ Aman terhadap segala resiko</li> <li>▪ Kompetensi dalam operasi</li> <li>▪ Dapat diandalkan sepenuhnya</li> <li>▪ Merasakan kebutuhan konsumen</li> <li>▪ Melayani permintaan konsumen</li> <li>▪ Gaya memenuhi kebutuhan konsumen</li> </ul>
Lebih murah	Harga	

Sumber: Slamet, 2002

<sup>12</sup> Buddy Ibrahim, *TQM (Total Quality Management): panduan untuk menghadapi persaingan global* (Jakarta: Djambatan, 2000), 15.



Berdasarkan uraian singkat di atas maka sebagai orkemas keagamaan, ada 4 (empat) mutu jasa yang idealnya GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta dan GPIB Jemaat “NEHEMIA” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor, lakukan untuk umat secara langsung maupun masyarakat umum secara tidak langsung seperti yang terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel “Keragaan Mutu Jasa GPIB”

Keragaan Mutu Jasa	Kategori	GPIB		Gabungan (Ekklesia + Nehemia)
		“Ekklesia”	“Nehemia”	
Persentase (%)				
Mutu Jasa Kepemimpinan	Rendah	59,1	31,3	35,2
	Tinggi	40,9	68,7	64,8
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Mutu Jasa Mental Spiritual	Rendah	53,0	41,3	47,5
	Tinggi	47,0	58,7	52,5
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Mutu Jasa Usaha Ekonomi	Rendah	71,3	57,5	70,1
	Tinggi	28,7	42,5	29,9
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Mutu Jasa Aksi Sosial	Rendah	54,3	70,0	59,4
	Tinggi	45,7	30,0	40,6
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Total Mutu Jasa (X <sub>2</sub> + X <sub>3</sub> + X <sub>4</sub> + X <sub>5</sub> )	Rendah	59,43	50,03	53,05
	Tinggi	40,57	49,97	46,95
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00
Jumlah Sampel (n)		164	80	244

Sumber: Data primer (diolah)

Ke-4 mutu jasa tersebut adalah: (1) Mutu jasa kepemimpinan yaitu fungsi kepemimpinan para pemimpin di GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta dan GPIB Jemaat “NEHEMIA,” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor; (2) Mutu jasa mental spiritual yaitu berbagai kegiatan yang bersifat seremonial-spiritual (ibadah/kebaktian) maupun pembinaan umat seperti forum seminar, sekolah minggu, atau *retreat*; (3) Mutu jasa usaha ekonomi yaitu upaya pemberdayaan melalui kegiatan produktif seperti pendirian koperasi atau pembelian *franchise*; dan (4) Mutu jasa aksi sosial yaitu pemberian bantuan konkrit kepada umat dan masyarakat yang membutuhkan seperti beasiswa atau bantuan terhadap korban bencana alam.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa mutu jasa yang dilakukan secara keseluruhan (kepemimpinan, mental spiritual, usaha ekonomi, dan aksi sosial) di kedua GPIB tersebut adalah relatif

sama, yaitu termasuk dalam kategori rendah, masing-masing 59,43% dan 50,03%.

Jika ditelusuri lebih jauh akan terlihat bahwa mutu jasa yang GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta berikan secara keseluruhan untuk umat termasuk dalam kategori rendah, sedangkan di GPIB Jemaat “NEHEMIA,” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor, mutu jasa kepemimpinan dan mental spiritual termasuk dalam kategori tinggi, masing-masing 68,7% dan 58,7%. Sebaliknya, mutu jasa usaha ekonomi dan aksi sosial termasuk dalam ketegori rendah, yaitu 57,5% dan 70,0%.

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mutu jasa yang bermakna (signifikan) di antara ke-2 GPIB tersebut maka dilakukan uji beda (*Uji U Mann Whitney*) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah.

Tabel “Hasil Uji Beda Mutu Jasa GPIB”

Peubah	Skor rata-rata		Beda Nyata pada peluang (Uji U Mann Whitney)
	Ekklesia	Nehemia	
Mutu Kepemimpinan	169,27	162,85	0.534 <sup>tn</sup>
Mutu Jasa Mental Spiritual	67,09	67,11	0.665 <sup>tn</sup>
Mutu Jasa Usaha Ekonomi	26,95	26,79	0.987 <sup>tn</sup>
Mutu Jasa Aksi Sosial	28,96	27,14	0.126 <sup>tn</sup>

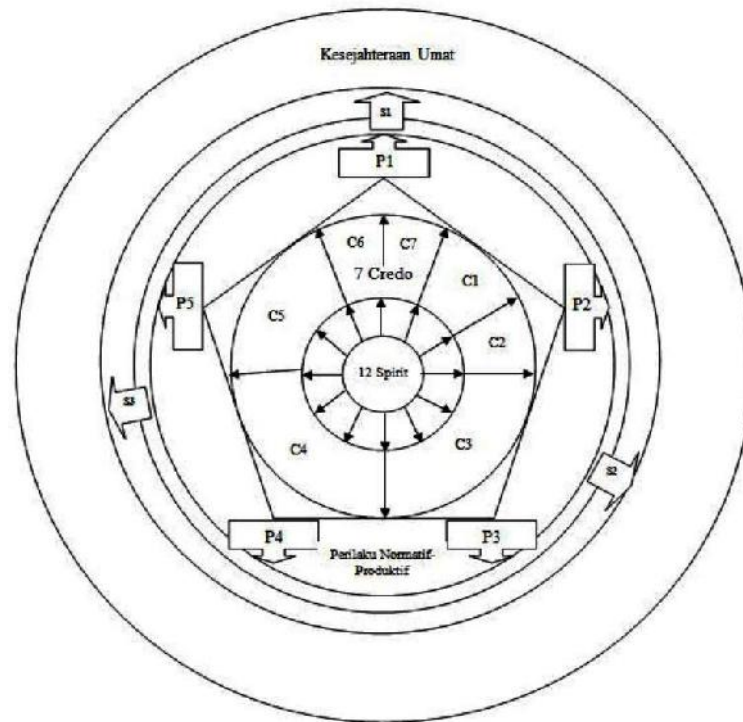
Sumber: Data primer (diolah)

Keterangan: tn : tidak berbeda nyata pada  $\alpha : 0.05$  (taraf nyata 95%)

Hasilnya menunjukkan bahwa mutu jasa secara keseluruhan (kepemimpinan, mental spiritual, usaha ekonomi, dan aksi sosial) yang dilakukan oleh GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta maupun GPIB Jemaat “NEHEMIA,” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor, tidak terdapat perbedaan yang bermakna (signifikan). Dengan kata lain adalah relatif sama (Lih. Tabel di bawah). Hal ini bermakna bahwa ke-2 GPIB belum berperan maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan karena seluruh mutu jasa yang diberikan masih rendah. Padahal seperti diketahui, orkemas keagamaan (termasuk GPIB Jemaat “EKKLESIA” DKI Jakarta dan GPIB Jemaat “NEHEMIA,” Desa Cipayung, Kabupaten Bogor) punya peran yang sangat strategis dalam membentuk nilai-nilai intrinsik umat dan masyarakat, termasuk merubah perilaku kurang produktif/miskin.

### Model Pemberdayaan Umat

Untuk itu dilakukan sintesis terhadap keragaan mutu jasa dan akar penyebab kemiskinan dalam satu model yang dinamakan “Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT” yang bertujuan agar ke-2 GPIB melakukan reposisi dan refungsionalisasi.



Gambar 2. “Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT”

12 Spirit (12S) yang artinya adalah: upaya pemberdayaan umat seyogianya berbasis pada 12 spirit yang menjadi keyakinan/kekuatan intrinsik (*power within*) bagi umat (Gymnastiar, 2005; Ginanjar, 2005; Sinamo, 2005; Aburdene, 2005; Bowell, 2004). Ke-12 Spirit tersebut adalah: (1) Cinta kasih; (2) Kebaikan; (3) Pengabdian diri; (4) Humanistik egaliter; (5) Partisipatori; (6) Keunggulan; (7) Penatalayanan yang baik; (8) Keindahan; (9) Kepercayaan; (10) Berteologi secara kontekstual; (11) Berakar, bertumbuh, dan berbuah; dan (12) Diberkahi untuk memberkahi.

7 Credo (7C), yaitu: 7 pengakuan kepercayaan dan komitmen diri yang merupakan penjabaran dari 12 spirit dalam pemberdayaan umat, yaitu: (1) Datangi umat/masyarakat dengan spirit *cinta kasih*; (2) Tinggallah dan berbagi hiduplah bersama umat

dengan spirit *kebaikan dan pengabdian diri*; (3) Kenalilah apa yang mereka butuhkan dan utamakan kebutuhan yang mereka dirasakan dengan spirit *humanistik-egaliter dan partisipatori*; (4) Semangati mereka untuk hidup yang bermakna dengan spirit: *keunggulan hidup, keindahan hidup dan penatayanan yang baik*; (5) Ajarilah mereka dengan spirit *kepercayaan*, dan *praksis hidup berteologi kontekstual* yang dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang kecil, dimulai dari yang mudah, dan dimulai sekarang juga; (6) Bangunlah kelompok kader yang berdaya saing, dan lembagakanlah prinsip masyarakat madani dengan spirit: *berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat*; dan (7) Akhirnya, katakanlah: “hiduplah selalu dalam damai sejahtera dan kemandirian kini dan selamanya” dengan spirit “*diberkahi untuk memberkahi orang lain.*”

5 Perilaku (5P) yang menjadi etos kerja normatif-produktif (5 kartu AS) dalam pemberdayaan umat, yaitu: (1) *Kerja keras*, artinya kerja adalah aktualisasi diri yang harus dilakukan dengan penuh semangat/antusias; (2) *Kerja cerdas* artinya kerja adalah hasil sinergi antara ilmu dan seni yang harus dilakukan penuh kreativitas dan daya inovasi; (3) *Kerja ikhlas* artinya kerja adalah *rahmat* yang harus dilakukan dengan penuh ketulusan dan ungkapan syukur; kerja adalah *amanah* yang harus dilakukan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab; dan kerja adalah *ibadah* yang harus dilakukan dengan serius penuh kecintaan; (4) *Kerja pantas*, artinya kerja adalah kehormatan yang harus dilakukan dengan ketekunan, dan (5) *Kerja tuntas*, artinya kerja adalah *panggilan* yang harus dilakukan dengan penuh integritas; kerja adalah *pelayanan* yang harus dilakukan secara sempurna dan kerendahan hati.

3 Strategi (3S) dalam pemberdayaan umat. Ketiga strategi tersebut (3S) adalah: (1) *Strategi sosio-karitatif*, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang digunakan untuk memulihkan kondisi umat supaya lebih berdaya (*power to*) dengan pendekatan sosial, solidaritas sosial atau merevitalisasi modal sosial untuk saling bekerjasama, saling menolong satu dengan yang lain dalam mensolusi permasalahan umat; (2) *Strategi sosio-ekonomis*, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang digunakan untuk memberdayakan ekonomi umat dengan berbagai uspro/ekonomi untuk mencapai kemandirian dana/daya (*power with*) sehingga tidak menjadi beban bagi umat yang lain; dan (3) *Strategi sosio-transformis*, yaitu langkah-langkah penyelesaian masalah yang digunakan untuk membangun kesadaran kritis umat, membangun gerakan moral-etik yang memberikan pencerahan, pembebasan, dan kesejahteraan bagi umat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Garam dan Terang dunia (GT), yaitu orkemas keagamaan seyogianya mampu melakukan reposisi dan refungsionalisasi sebagai garam dunia yang memberikan cita rasa bagi kehambaran

dunia, dan memberikan suluh dalam menerangi kegelapan kemiskinan di mana orkemas keagamaan berada.

#### *Kekuatan dan Kelemahan Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT*

Kekuatannya, antara lain:

- (1) Dimulai dari hati berfungsi sebagai radar kehidupan yang bermakna, dan dimulai dari dalam keluar (*insight-out* yang bersifat *educare*).
- (2) Berbasis pada konsep pembelajaran PDCA (*plan, do, check, Action*) sehingga semua orang belajar sambil bekerja, semua *stakeholders* menjadi pembelajar dalam suasana egaliter-humanistik guna dapat menciptakan masyarakat belajar (*learning society*);
- (3) Mudah diadopsi, khususnya bagi penyuluh pembangunan karena dimulai dari manusia. Berfokus pada perubahan perilaku, yaitu: aspek kognitif (cara pandang), afektif (sikap mental/mental model), dan psiko-motorik (keterpaduan pola tindak) melalui pencarian dan penerapan inovasi tiada henti. Meningkatkan kompetensi, konfidensi, dan komitmen bagi rumahtangga miskin sehingga membentuk dan melembagakan nilai-nilai kehidupan yang universal dan normatif.
- (4) Mengacu pada hasil analisis berpikir sistemik (*system thinking analysis*) terhadap akar penyebab kemiskinan sehingga pada gilirannya rumahtangga miskin bisa terlepas dari jeratan kemiskinan dan pemiskinan.
- (5) Mengutamakan modal lokal yang dimiliki oleh rumahtangga miskin, khususnya modal manusia dan modal sosial, seperti: budaya gotong-royong, saling percaya dan kelembagaan lokal.

Kelemahannya, antara lain:

- (1) Menuntut penyuluh untuk belajar bagaimana menjadi penyuluh (*learning how to be*); menyadarkan penyuluh bahwa profesi penyuluh adalah misi suci, ibadah dan amanah dalam memberikan pencerahan, pencerdasan dan pembebasan bagi kemaslahatan umat manusia.
- (2) Menuntut penyuluh untuk menyuluh dengan aksi nyata yang bermakna (*Learning to do, and learning to live together*).
- (3) Menuntut komitmen total dan partisipasi total dari *multi-stakeholders* (lintas sektoral) yang berkaitan dalam upaya pemberdayaan rumahtangga miskin.
- (4) Menuntut intervensi jangka panjang dalam menjawab berbagai penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar/akar penyebab kemiskinan.

### Penerapan Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT

Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT perlu diterapkan guna upaya memaksimalkan peran GPIB dalam penanggulangan kemiskinan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat umum. Penerapan model tersebut idealnya harus mengacu pada konsep pembelajaran PDCA Deming, yaitu: *plan, do, check, and act* (Hradesky, 1995; Slamet, 2002). Dengan kata lain, model tersebut pada dasarnya mengutamakan proses pembelajaran kolektif (*learning organization / learning society*), inovasi tiada henti, komitmen total, partisipasi total, dan berfokus pada kepuasan pelanggan dalam konteks Manajemen Mutu Terpadu (*TQM*).

#### *Tabap Perencanaan*

Perencanaan kegiatan mengadopsi filosofi, yaitu: “jika anda gagal dalam berencana, berarti anda berencana untuk gagal” (*if you fail to plan, you are planning to fail*) (Ibrahim, 2004). Perencanaan merupakan salah satu fungsi strategis dalam manajemen yang memberikan pedoman mengenai hal-hal yang akan dituju untuk mencapai suatu tujuan. Pada tahapan ini dipersiapkan seluruh rencana implementasi program pemberdayaan rumahtangga miskin. Salah satu fungsi perencanaan dalam manajemen mutu terpadu (MMT), yaitu pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data, melalui hasil analisis statistik, eksplorasi akar permasalahan, dokumentasi, kalkulasi biaya, dan pemecahan masalah yang sistematis.

Berdasarkan temuan penelitian, maka dirancang beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahapan perencanaan, yaitu:

- (1) Diseminasi Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT kepada *stakeholders* kunci atau tokoh formal/informal dan seluruh *stakeholders* strategis terkait untuk mendapatkan dukungan. filosofi penyuluhan yang digunakan yaitu: filosofi “membakar sampah secara tradisional” dan filosofi “bermain bola sodok” (Asngari, 2001).
- (2) Menggalang dukungan (*buy-in*) dan membangun kesadaran kolektif antara pemimpin, umat, dan masyarakat tentang pentingnya upaya penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.
- (3) Melakukan pengorganisasian masyarakat (*community organizing*), pembentukan tim kerja/forum multi-stakeholders atau revitalisasi lembaga yang telah ada untuk

melakukan analisis kemiskinan partisipatif dan reformasi kebijakan publik.

#### *Tahap Pelaksanaan*

Proses pelaksanaan Model Navigasi 12S-7C5P-3S-GT dalam upaya penanggulangan kemiskinan mengutamakan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, antara lain: transparansi, partisipatif, akuntabel, profesional, visi strategis, pengawasan, demokratis-dialogis, responsif, humanistik-egaliter, kesetaraan gender, keadilan, keberpihakan pada kepentingan rumah tangga miskin, dan memuaskan semua *stakeholders*. Dengan demikian tahapan pelaksanaan kegiatan dapat dimulai, antara lain dari: (1) Berbagi visi bersama, membangun rasa percaya diri, tanggung jawab moral atau komitmen menyeluruh antara pemimpin GPIB dengan umat maupun *stakeholder* lainnya sesuai dengan kebutuhan dan (2) Melakukan peningkatan kapabilitas (*capability building*) pemimpin dan umat melalui berbagai pembinaan maupun pelatihan yang relevan dan yang dibutuhkan.

#### *Tahap Pemantauan dan Evaluasi*

Kegiatan pemantauan dan evaluasi mengacu pada filosofi: “perbaikan terus-menerus untuk mencapai inovasi yang terbaik”. Dengan demikian pemantauan dan evaluasi dilakukan secara partisipatif dan terus-menerus dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif yang telah ditetapkan sebelum program dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi mempunyai dua tujuan, yaitu: pencegahan, dan perbaikan.

Pemantauan program dapat dilakukan secara formal maupun secara informal dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama selama program berlangsung. Dari segi dimensi waktu, jenis evaluasi yang digunakan yaitu, evaluasi proses, evaluasi akhir, dan evaluasi dampak, sedangkan dari sisi sumber evaluator, evaluasi dilakukan secara bersama-sama antara *stakeholders* lokal (internal) dan *stakeholders* dari luar (eksternal).

#### *Tahap Tindak Lanjut*

Berdasarkan hasil penilaian terhadap masukan (*input*), proses, hasil yang dicapai (*output*) dan manfaat yang dirasakan (*outcome*), maka dilakukan perbaikan/tindak lanjut secara terus-menerus dengan mengikuti siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action). Pada tahap tindak lanjut, diharapkan *stakeholders* lokal (umat) bersama lembaga swadaya masyarakat dapat mengelola program penanggulangan kemiskinan secara mandiri.

### Kesimpulan

- (1) Mutu jasa yang GPIB Jemaat "Ekklesia" dan GPIB Jemaat "Nehemia" lakukan secara keseluruhan (kepemimpinan, mutu jasa mental spiritual, mutu jasa usaha ekonomi, dan mutu jasa aksi sosial) untuk umat dan masyarakat termasuk dalam kategori rendah.
- (2) Mutu jasa yang GPIB Jemaat "Ekklesia" dan GPIB Jemaat "Nehemia" lakukan untuk umat dan masyarakat tidak terdapat perbedaan yang bermakna (signifikan) antara mutu kepemimpinan, mutu jasa mental spiritual, mutu jasa usaha ekonomi, dan mutu jasa aksi sosial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mutu jasa yang dilakukan oleh ke-2 GPIB tersebut, adalah relatif sama.
- (3) Model generik pemberdayaan umat: "Model Navigasi:12S-7C5P-3S-GT" di mana 12S adalah 12 Spirit, 7C adalah 7 Credo, 5P adalah 5 Perilaku, 3S adalah 3 Strategi, dan GT adalah Garam dan Terang.
- (4) Peran-peran strategis yang dapat dilakukan oleh GPIB dengan mengacu pada "Model Navigasi:12S-7C5P-3S-GT" dalam menanggulangi kemiskinan, yaitu sebagai reformator, transformator, motivator, dan pembangun nilai. Untuk itu ke-2 GPIB perlu melakukan reposisi dan refungsionalisasi.

### Tentang Penulis

Rohadi Joshua Sutisna adalah Pendeta/Ketua Majelis Jemaat GPIB "GIDEON" DKI Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta pada tahun 1990, Magister Sains di Institut Pertanian Bogor dengan Program Studi Komunikasi Pembangunan pada tahun 1999, sedang Program Doktor dengan Program Studi Penyuluhan Pembangunan terhenti usai melaksanakan Seminar Terbuka pada tahun 2008.



### Bibliografi

- Biro Pusat Statistik. "Tingkat Kemiskinan Di Indonesia: Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006." BPS, 2006.
- Ibrahim, Buddy. *TQM (Total Quality Management): panduan untuk menghadapi persaingan global*. Jakarta: Djambatan, 2000.
- Komite Penanggulangan Kemiskinan. *Dokumen Interim Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Sebuah Kerangka Proses Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jangka Panjang*. Jakarta: KPK, 2003.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*. 3rd ed. New York: Allyn and Bacon, 1997.
- Papilaya, Eddy Chiljon. "Akar Penyebab Kemiskinan Menurut Rumahtangga Dan Strategi Penanggulangannya: Kasus Di Kota Ambon Provinsi Maluku Dan Di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo." Disertasi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Prasetyo, Anjas. "Romo Mangun, Pembela Wong Cilik Kali Code." *Kompasiana*, November 10, 2012. <http://sosbud.kompasiana.com/2012/11/10/romo-mangun-pembela-wong-cilik-kali-code-507976.html>.
- Rahayu, Sri. *SPSS Versi 12.00 Dalam Riset Pemasaran*. Bandung: AlfraBeta, 2005.
- Ritonga, Hamonangan. "Mengapa Kemiskinan Di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?" *Kompas*, 2003. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0402/10/ekonomi/847162.htm>.
- Santoso, Singgih. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Slamet, M. "Materi Kuliah Manajemen Mutu Terpadu (MMT)." Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2002.
- Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons, 1958.
- Widodo, Joko. *Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia, 2001.